

Agribisnis Perdesaan (PUAP Evaluasi Dampak Ekonomi Pelaksanaan Program Pengembangan) di Gapoktan Karya Tani, Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar

Risa Bilqis Febriana

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

ABSTRACT

The purpose of this study was to describe the implementation and evaluation of the impact of Rural Agribusiness Enterprise Development program (PUAP) in Gapoktan Karya Tani, Village Bendosewu, District Talun, Blitar Regency. Poverty is still a major problem in particular problems in the rural area, besides poverty is also one form of development problems up to this point have not yet found the right solution to handle it. The Government has sought in combating poverty in the rural area that is one of them through the program of Rural Agribusiness Enterprise Development (PUAP). One of the Gapoktan which has a rapid development associated with the management of the grant funds, namely Gapoktan Karya Tani. This research uses qualitative research methods. Data collected by doing the method of observation, interview and documents study. Determination of the informant is done using the technique of purposive sampling, that the parties are deemed to know and understand about the implementation of the PUAP programme in Gapoktan Karya Tani, then due to circumstances in the field then the researchers also used the technique of snowball sampling. Based on the results of the study it can be concluded that the implementation of the PUAP programme in Gapoktan Karya Tani quite rapidly this is evidenced by the amount of funds which initially totaled Rp 100 million now developed into Rp 197,392,000. Then the existence of a program capable of impacting economic PUAP against society. The perceived economic impact of Bendosewu village community is the impact of the production of agricultural commodities, supply and demand for agricultural commodities, as well as farmer income and household spending farmers. However, if seen from the marketing of agricultural commodities that PUAP program has not been able to provide a meaningful impact for the community the farmer in the village of Bendosewu due to a marketing system utilised community both before and after the existence of the program unchanged.

Keyword: Agriculture Development, The Evaluation Economic Impact Of The Program, The Business Development Of Agribusiness.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama yang dialami setiap negara yang sedang berkembang akibat dari kegagalan pembangunan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemiskinan global merupakan masalah yang hingga saat ini sulit untuk diselesaikan. Schiller (dalam: Karnaji, 2011:15) yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Lain halnya dengan Robert Chambers (dalam: Karnaji, 2011:19) mengemukakan bahwa inti dari masalah kemiskinan sebenarnya terletak pada apa yang disebut dengan *deprivation trap* atau perangkap kemiskinan. *Deprivation trap* terdiri dari lima unsur yaitu kemiskinan (*proper*), kelemahan fisik, keterasingan (*isolation*), kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*) dan ketidakberdayaan (*powerless*).

Salah satu negara yang juga sedang mengalami masalah kemiskinan yaitu Indonesia. Data BPS menunjukkan bahwa angka kemiskinan yang dialami Indonesia pada Maret 2016 mencapai 28 juta jiwa atau 10,86 persen. Jika dibandingkan pada Maret pada tahun yang sama angka tersebut mengalami penurunan. Pada September 2015 data

menunjukkan 28,5 juta jiwa atau 11,13 persen (Badan Pusat Statistik, 2016 <https://www.bps.go.id/> diakses pada tanggal 3 Oktober 2016). Walaupun, angka tersebut menunjukkan penurunan, tetapi penurunan yang terjadi tidak secara signifikan.

Masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia memang sulit untuk diselesaikan. Hal yang membuat sulitnya mengentaskan masyarakat dari kemiskinan yaitu pada hakekatnya belum ada keberlanjutan (*sustainability*) sistem penanganan kemiskinan baik dalam satu rezim kekuasaan maupun pada saat peralihan rezim (Pattinama, 2009:1). Jumlah penduduk Indonesia yang besar yaitu sebesar 255.993.674 jiwa, Indonesia menduduki peringkat ke 4 dunia sebagai jumlah penduduk terbanyak di dunia. Jumlah penduduk yang besar juga akan menghambat upaya untuk memerangi kemiskinan di Indonesia.

Tabel Jumlah Penduduk Miskin 2013-2016 (ribu jiwa)

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)		
	Kota	Desa	Kota+Desa
September 2013	10.634, 47	17.919,46	28.553,93
Maret 2014	10.507, 20	17.772,83	28.280,03
September 2014	10.356, 69	17.365,09	27.727, 78
Maret 2015	10.652, 64	17.940,15	28.592, 79
September 2015	10.619, 86	17.893,71	28.513,57
Maret 2016	10.339,8	17.665,6	28.005,41

Sumber : Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/> (diakses tanggal 17 Oktober 2016)

Berdasarkan tabel yang telah disajikan menunjukkan jumlah kemiskinan yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 2013 sampai awal 2016. Data menunjukkan bahwa jumlah kemiskinan di Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan. dari tahun ketahun angka kemiskinan masih didominasi oleh wilayah perdesaan. Desa sering dikaitkan dengan kemiskinan, keterbelakangan dan tata kehidupan yang masih tradisional. Kemiskinan di desa terjadi akibat dari perhatian utama dari pemerintah justru lebih tercurah ke daerah-daerah perkotaan serta memusatkan sektor ekonominya hanya pada perkotaan. Kemudian, investasi pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan pelayanan masyarakat di perdesaan justru kurang memadai karena sebagian besar dananya tercurah ke sektor-sektor modern di perkotaan (Todaro, 2000:200). Kegiatan perekonomian di perdesaan pada umumnya masih dijalankan dengan menggunakan sistem perekonomian yang masih tradisional. Lapangan kerja yang ditawarkan di desa juga sangat terbatas. Sebagian masyarakat perdesaan hanya memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga mereka kurang memiliki kompetensi di sektor lainnya.. Wilayah perdesaan hanya mengandalkan pada satu sektor yaitu sektor pertanian.

Hasil sensus pertanian dari BPS tahun 2013 menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga usaha pertanian tercatat sebanyak 26,14 juta rumah tangga (Sensus Pertanian 2013, BPS <http://st2013.bps.go.id/dev2/index.php> diakses pada tanggal 17 Maret 2016). Adapun yang dimaksud dengan rumah tangga usaha pertanian adalah rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya mengelola usaha pertanian dengan tujuan

sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual, baik usaha pertanian milik sendiri, secara bagi hasil, atau milik orang lain dengan menerima upah, dalam hal ini termasuk jasa pertanian.

Sebesar 14,25 juta rumah tangga merupakan petani gurem (Sensus Pertanian 2013, BPS <http://st2013.bps.go.id/dev2/index.php> diakses pada tanggal 17 Maret 2016) Adapun yang disebut dengan petani gurem adalah rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0,50 Ha. Data menunjukkan bahwa dari sebesar 98,53 persen rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan, sebesar 55,33 persennya merupakan petani gurem. (Sensus Pertanian 2013, BPS <http://st2013.bps.go.id/dev2/index.php> diakses pada tanggal 17 Maret 2016). Dari gambaran sejumlah data, menjelaskan bahwa sebagian besar petani di Indonesia merupakan golongan petani gurem. Melihat fenomena tersebut telah jelas bahwa lebih dari sebagian petani di Indonesia berada di bawah garis kemiskinan.

Input dari usaha pertanian pada umumnya adalah lahan, tenaga kerja dan modal. Modal sebenarnya adalah representasi input fisik yang digunakan dalam produksi pertanian dalam unit moneter (Haryanto et al, 2009:57). Peran dari modal sendiri merupakan salah satu faktor produksi para petani yang dinilai penting. Sebab, tanpa modal proses produksi dan kegiatan pertanian akan lumpuh atau bahkan tidak mampu berjalan. Keadaan petani yang sebagian berada di bawah garis kemiskinan sangat memungkinkan jika petani-petani tersebut sangat sulit memperoleh modal yang memadai yang digunakan sebagai faktor produksi. Ketersediaan modal yang dimiliki oleh petani yang terbatas tentunya akan mempengaruhi hasil produksi dari petani. Modal yang sedikit membuat petani semakin kesulitan untuk membiayai lahan yang digunakan untuk bertani. Keadaan tersebut membuat pendapatan yang diperoleh petani menjadi semakin sedikit.

Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam upaya untuk membantu petani memperoleh modal resmi yang mudah dan ringan. Upaya pemerintah tersebut secara tidak langsung telah berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan di wilayah perdesaan, mengingat sebagian besar masyarakat miskin berada di wilayah perdesaan yang bermata pencaharian sebagai petani. Menurut (Todaro,1985:159) memberantas kemiskinan dapat dilakukan dengan menggunakan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan rencana yang langsung ditujukan pada kemiskinan, hal tersebut dinilai efektif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk itu, peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani dapat dilihat melalui kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan pemerintah dalam bentuk program-program.

Banyak program-program yang telah diluncurkan pemerintah dalam rangka untuk membantu para pemilik usaha kecil, khususnya usaha dibidang pertanian yang merupakan usaha padat modal. Pemerintah membantu mengatasi permasalahan tersebut dengan meluncurkan program-program yang berfokus pada pemberian kredit ringan untuk masyarakat petani diantaranya yaitu program PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Hal yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti program PUAP karena program ini memiliki perbedaan dengan program-program lainnya seperti KUR dan KKPE. Letak perbedaannya yaitu kredit dari pemerintah disalurkan tanpa perantara lembaga keuangan atau bank. Pemerintah menyalurkan kredit langsung kepada petani, yaitu langsung melibatkan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Dapat dikatakan bahwa program ini benar-benar menuntut petani untuk mandiri dalam mengelola kredit dari pemerintah selain itu program ini juga berusaha untuk membangun kelembagaan di tubuh pertanian. Pemerintah tidak melepas petani begitu saja tetapi dalam pelaksanaan program ini para petani juga mendapatkan pendampingan dari para Penyuluh Pendamping Lapangan (PPL) dan Penyelia Mitra Tani (PMT).

Satu lagi yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti program ini adalah adanya penekanan usaha agribisnis, dengan program ini petani didampingi agar mampu melakukan usaha di bidang agribisnis. Seiring dengan perubahan lingkungan global dan kemajuan di sektor pertanian, maka isu terhangat dibidang pertanian yaitu agribisnis. Agribisnis sendiri diartikan oleh White (dalam: Haryanto et al., 2009: 21) adalah industri manufaktur pertanian yang terdiri dari usaha baik industri penyedia input pertanian maupun industri pengolah hasil pertanian.

Salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang memiliki usaha di bidang pertanian yang besar dan menjadi sektor primer pertanian di Jawa Timur yaitu Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar dengan luas 158.879 Ha, apabila di lihat dari penggunaan lahannya tampak bahwa 19,96 persen merupakan luas sawah yaitu sebanyak 31.705 ha dan 80,04 persen merupakan bukan lahan sawah 67.281 (BPS, 2013 <http://st2013.bps.go.id/st2013esya/booklet/st3505.pdf> , diakses pada tanggal 17 maret 2016) . Data BPS menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga pertanian yang ada di Kabupaten Blitar sebanyak 209.032 rumah tangga pertanian, walaupun mengalami pertumbuhan -17 persen, pertanian tetap menjadi sektor primer dalam peningkatan perekonomian di Kabupaten Blitar. Selain itu, keadaan yang begitu

geografis memang sangat sesuai jika dikembangkan usaha pertanian.

Tabel Jumlah dan Pertumbuhan Rumah Tangga Petani Gurem di Beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2003 dan 2013

Kabupaten/Kota	Rumah Tangga Petani Gurem		Pertumbuhan (persen)
	2003	2013	
Blitar	197.736	164.755	-16,68
Pacitan	79.179	86.748	9,56
Ponorogo	165.558	149.523	-9,69
Trenggalek	124.993	122.215	-2,22
Tulungagung	172.648	120.481	-30,22
Kediri	229.239	163.429	-28,71
Malang	284.976	234.946	-17,56
Kota Blitar	9.056	4.329	-52,20
Lumajang	155.247	126.419	-18,57
Jember	216.369	160.708	-25,73

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur* (<http://st2013.bps.go.id/st2013esya/booklet/at3500.pdf>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2016)

Tabel yang telah disajikan menjelaskan bahwa jumlah petani gurem telah mengalami pertumbuhan sebanyak -16,68 persen, yang artinya jumlah rumah tangga petani gurem di Kabupaten Blitar menurun jika dibandingkan pada tahun 2003. Walaupun jumlah petani gurem menurun, namun jumlah petani gurem di Kabupaten Blitar masih sangat tinggi karena dari total jumlah seluruh rumah tangga pertanian yaitu sebesar 208.639, sebanyak 164.755 merupakan petani gurem. Hal tersebut menyatakan bahwa lebih dari setengahnya merupakan petani gurem. Lahan yang terbatas petani tidak dapat memproduksi hasil pertanian secara maksimal selain itu petani miskin sangat sulit untuk mengakses modal yang digunakan untuk menggarap dan mengembangkan lahan sawah yang dimiliki.

Salah satu Gapoktan di Kabupaten Blitar yang terpilih untuk melaksanakan program PUAP ini adalah Gapoktan Karya Tani, gapoktan ini terletak di Desa Bendosewu, Kecamatan Talun., Kabupaten Blitar. Pemberian dana PUAP tidak dilakukan di semua desa, melainkan dilakukan di desa-desa yang telah lolos seleksi. Pemberian dana PUAP diutamakan untuk daerah-daerah yang tertinggal namun yang memiliki potensi pengembangan agribisnis (Kementerian Pertanian, 2015). Sebagian besar masyarakat desa Bendosewu bekerja dibidang pertanian dan perikanan. Hasil utama pertanian di desa tersebut yaitu padi masih menjadi komoditi utama, selain itu banyak masyarakat yang juga membudidayakan ikan hias koi serta ketika musim rambutan juga masih menjadi hasil pertanian walau kurang menjanjikan.

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah penelitian yang hendak dicari jawabannya adalah bagaimana pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Gapoktan Karya Tani, Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar dan bagaimana evaluasi dampak ekonomi pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Gapoktan Karya Tani, Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Gapoktan Karya Tani, Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar dan untuk mendeskripsikan evaluasi dampak ekonomi pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) pada Gapoktan Karya Tani, Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar.

Secara akademis manfaat penelitian ini adalah diharapkan mampu menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis yaitu tentang pelaksanaan program PUAP serta dampak ekonomi pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan Ilmu Administrasi Negara dalam bidang Pembangunan khususnya pada mata kuliah Evaluasi dan Pengawasan Pembangunan yaitu pada aspek Evaluasi Pembangunan serta skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait mengenai pentingnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat petani melalui program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) pada Gapoktan Karya Tani, Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar khususnya. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Blitar khususnya Dinas Pertanian Kabupaten Blitar mengenai evaluasi dampak program yang berkenaan dengan pengentasan kemiskinan pada masyarakat petani dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan agribisnis serta pemberian kredit yang ringan untuk masyarakat petani.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe peneliti deskriptif. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada tingkat kesesuaian (*purposive*) lokasi dengan fenomena yang sedang diangkat, yaitu tentang dampak ekonomi pelaksanaan program PUAP terhadap anggota Gapoktan Karya Tani di Desa Bendosewu, Kabupaten Blitar. Sehingga lokasi

yang digunakan tempat untuk penelitian adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Talun dan Gabungan Kelompok Tani “Karya Tani”. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan secara *purposive*, yaitu informan ditentukan dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian atau tujuan tertentu (Satori dan Komariah, 2009: 50). Akan tetapi ketika peneliti di lapangan, peneliti juga menggunakan teknik *snowball sampling*. Teknik tersebut peneliti gunakan ketika akan wawancara dengan pihak dinas. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Teknik analisa data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Program

(Kunarjo, 2002:86) yang memberikan pendapat bahwa pengertian program adalah perangkat dari kegiatan-kegiatan atau paket dari kegiatan yang diorganisasikan untuk tujuan pencapaian sasaran yang khusus, seperti program yang telah dispesifikasi dari segi tujuannya.

Makna lain dari program dijelaskan oleh (Pasolong, 2010:92) yang menyatakan bahwa program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran, tujuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Program

Kaitanya dengan studi kebijakan publik, implementasi atau pelaksanaan merupakan bagian dari salah satu proses suatu kebijakan yang terdiri dari (1) Penyusunan Agenda (2) Formulasi Kebijakan (3) Adopsi Kebijakan (4) Implementasi Kebijakan serta (5) Penilaian Kebijakan (Dunn, dalam: Subarsono, 2006: 9).

Ripley dan Franklin (dalam: Winarno, 2007: 145) memberi gagasannya terkait dengan pengertian dari implementasi. Menurutnya implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis keluaran yang nyata.

Menurut (Agustino, 2006:139) pengertian dari implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, yang pada akhirnya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai.

Aspek dalam Pelaksanaan Program

Tahap pelaksanaan kebijakan dalam proses kebijakan publik merupakan tahapan yang paling penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena pada fase ini dapat dilihat tingkat keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan (Udoji dalam: Agustino, 2006: 140). Mengingat pentingnya implementasi kebijakan atau program dalam proses kebijakan publik maka perlu memperhatikan beberapa aspek dalam melaksanakan suatu kebijakan atau program berikut ini (Agustino, 2006: 139) :

1. Adanya tujuan dan sasaran kebijakan
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan
3. Adanya hasil program

Evaluasi

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituenya, selain itu evaluasi juga digunakan untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan (Dwijowijoto, 2004:183). Menurut Thomas Dye (dalam: Parsons, 2005: 547) Evaluasi adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai.

Secara umum menurut (Dunn, 2000:608) evaluasi dapat disamakan dengan beberapa istilah seperti penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*). Berdasarkan kategori dari evaluasi pelaksanaan program yang dikemukakan oleh (Dunn, 2000:614), yang mana Dunn mengklasifikasikan evaluasi implementasi program yang didasarkan atas waktu pelaksanaan dari evaluasi itu sendiri yang terdiri dari evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif meliputi usaha-usaha yang dilakukan secara terus-menerus untuk memantau pencapaian tujuan dan target. Evaluasi formatif ini dilakukan ketika suatu program sedang berjalan atau sedang diimplementasikan. Tujuan dilakukan evaluasi ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh suatu program telah diimplementasikan dan kondisi apa yang memadai untuk meningkatkan keberhasilan dari suatu program (Palumbo dalam: Parsons, 2005: 549). Palumbo menambahkan, sedangkan, evaluasi sumatif yaitu evaluasi yang berusaha melihat program secara aktual berdampak pada *problem* yang ditanganinya. Evaluasi sumatif sering dikenal dengan evaluasi dampak.

Dampak

(Dunn, 2000:513) membagi Jenis-jenis hasil kebijakan yang terdiri dari keluaran (*outputs*) dan dampak (*impacts*). Keluaran adalah hasil dari pelaksanaan program yang dapat diterima oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran, dapat berupa

barang, layanan atau sumberdaya. Dampak merupakan perubahan nyata yang dapat dirasakan masyarakat kelompok sasaran setelah menerima keluaran dari pelaksanaan program. Menurut (Widodo,2011:120) riset evaluasi *impact* ini berkaitan dengan sampai sejauh mana suatu kebijakan menyebabkan perubahan sesuai dengan yang dikehendaki (*intendeed impact*). Tujuan adanya riset mengenai dampak tersebut yaitu untuk menguji efektivitas suatu kebijakan atau program dalam pencapaian tujuannya. Widodo menambahkan bahwa suatu kebijakan atau program dikatakan mempunyai dampak manakala kebijakan atau proyek tersebut dapat mencapai perubahan ke arah tujuan dan sasaran (*goal and objectives*) yang dikehendaki. Wahab (dalam: Setijaninrum, 2011:181) mendefinisikan dampak adalah dimaksudkan untuk mengkaji akibat-akibat dari suatu kebijakan atau dengan kata lain untuk mencari jawaban apa yang terjadi setelah suatu kebijakan diimplementasikan.

Penilaian Dampak

Berdasarkan pendapat dari Rossi dan Freeman (dalam: Parsons, 2005:604) pengertian dari penilaian atas dampak adalah untuk memperkirakan apakah intervensi menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak. Rossi dan Freeman menambahkan bahwa tujuan dasar dari penilaian dampak adalah untuk memperkirakan efek yang terjadi dari sebuah intervensi yakni perkiraan dampak intervensi yang tidak dipengaruhi oleh pengaruh dari proses dan kejadian lain yang mungkin juga mempengaruhi perilaku atau kondisi yang menjadi sasaran suatu program yang sedang evaluasi.

Tabel Metode untuk Evaluasi Dampak Program

Jenis Evaluasi	Pengukuran Kondisi		Kelompok Kontrol	Informasi yang Diperoleh
	Secelum	Sesudah		
<i>Single program after only</i>	Tidak	Ya	Tidak ada	Keadaan kelompok sasaran
<i>Single program before after</i>	Ya	Ya	Tidak ada	Perubahan kelompok sasaran
<i>Comparative after only</i>	Tidak	Ya	Ada	Keadaan kelompok sasaran dan kelompok kontrol

<i>Comparative before-after</i>	Ya	Ya	Ada	Efek program terhadap kelompok sasaran dan kelompok kontrol
---------------------------------	----	----	-----	---

Sumber : Finsterbusch dan Motz (dalam :Subarsono, 2005:128-130)

Penilaian dampak yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan menggunakan metode *single program before after*, yaitu dengan melihat perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran sebelum dan sesudah pelaksanaan program.

Ekonomi Pertanian

Bidang pertanian memiliki hubungan yang erat dengan kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat di perdesaan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Hal tersebut memungkinkan bahwa dalam bidang pertanian juga membutuhkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ekonomi untuk mengkaji bidang tersebut. Ilmu ekonomi pertanian adalah ilmu yang mempelajari fenomena-fenomena dan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pertanian, baik mikro maupun makro. Ilmu ekonomi pertanian merupakan ilmu yang mempelajari perilaku dan upaya manusia, baik yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan produksi, pemasaran dan konsumsi hasil dari pertanian (Hanafie, 2010: 3). Ilmu ekonomi pertanian adalah penerapan ilmu sosial yang berhubungan dengan bagaimana produsen, konsumen dan masyarakat menggunakan sumber daya langka dalam produksi, pengolahan, pemasaran dan konsumsi produk pangan dan serat (Haryanto et al, 2009:6).

Untuk menilai segi ekonomi dari dampak ekonomi pelaksanaan program PUAP, dapat dilihat dengan menggunakan model ekonomi pertanian dari Rahim dan Hastuti yang terdiri dari :

1. Produksi Komoditas Pertanian

Produksi pertanian (*on farm*) merupakan fokus pertama yang akan mempengaruhi proses selanjutnya hingga menghasilkan output (Rahim dan Hastuti, 2007: 30). Untuk aspek produksi komoditas pertanian ini dapat dilihat melalui jumlah produksi hasil pertanian, kualitas produksi hasil pertanian serta tingkat kepemilikan faktor produksi.

2. Permintaan dan Penawaran Komoditas Pertanian.

Teori terkait dengan permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) menunjukkan adanya interaksi antara penjual dan pembeli (Rahim dan Hastuti, 2007: 69). Aktivitas permintaan dan

penawaran dapat diketahui melalui tingkat aktivitas jual pembeli antara penjual dan pembeli hasil pertanian.

3. Pemasaran Komoditas Pertanian

Untuk melihat aspek pemasaran komoditas pertanian maka dapat diketahui dari pemanfaatan hasil produksi disetiap petani selain itu juga perlu dilihat melalui pengolahan hasil produksi.

4. Usaha Tani serta Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga Petani.

Usaha tani dianggap memiliki peran penting dalam kegiatan pertanian. kemudian, aspek ini dapat dilihat melalui jenis usaha tani yang dijalankan, pendapatan dari petani serta tingkat pengeluaran petani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Gapoktan Karya Tani

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan merupakan program yang serupa dengan Kredit Usaha Tani (KUT) pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Dapat dikatakan program ini merupakan perbaikan dari program KUT sebagai program pendahulunya. Program ini dibuat dengan terintegrasi dengan program PNPM-Mandiri. Bentuk dari program ini adalah pemberian dana hibah pada tingkat desa yang nantinya dikelola oleh Gapoktan. Dana hibah yang diberikan yaitu sebesar 100 juta dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan dari petani. *Leading sector* dari program PUAP di Kabupaten Blitar pada awalnya yaitu BP4K, sempat terjadi peralihan antara BP4K dan dipindah ke Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar. Untuk saat ini *leading sector* dipegang oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar karena BP4K sudah dihapuskan.

Tujuan dan Sasaran Program

Berdasarkan pendapat dari informan tujuan dari program PUAP yaitu untuk mensiasati dan meringankan petani dari kesulitan-kesulitan yang dialami khususnya masalah tentang kepemilikan modal, dengan tujuan akhir yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dari petani. Berdasarkan pendapat informan bahwa sasaran program PUAP adalah seluruh desa. Namun, di Kabupaten Blitar sendiri hingga saat ini belum semua desa yang dapat merasakan program PUAP. Dari total seluruh desa di Kabupaten Blitar yang berjumlah 248 desa hingga saat ini yang mendapatkan PUAP mencapai 190 desa, yang artinya masih terdapat 58 desa yang belum mendapatkan PUAP hingga saat ini.

Aktivitas Atau Kegiatan Pencapaian Tujuan

Desa Bendosewu sendiri mendapatkan PUAP sejak tahun 2011. Namun karena ada

prosedur yang harus dipenuhi maka dana hibah tersebut cair pada akhir 2012 dan dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu tahun 2013. Dana hibah yang diberikan pemerintah kepada setiap Gapoktan dalam pengelolaannya memang dilimpahkan kepada Gapoktan. Pengelolaan dana tersebut pemerintah tidak memberikan aturan karena semua dilimpahkan penuh kepada Gapoktan. Dana hibah tersebut dapat digunakan untuk usaha apa saja, asalkan sesuai dengan kesepakatan seluruh anggota Gapoktan dan disesuaikan dengan proposal atau RUB yang telah dibuat. Di Kabupaten Blitar sendiri sebagian besar Gapoktan menggunakan dan tersebut untuk simpan pinjam, sama halnya di Desa Bendosewu juga mengelola dana hibah PUAP untuk simpan pinjam. Ada pelatihan untuk para pengurus Gapoktan yang dilaksanakan setelah pemberkasan dan verifikasi. Pelatihan diberikan kepada para pengurus Gapoktan karena rendahnya SDM yang dimiliki oleh petani serta sebagian besar pengurus Gapoktan berusia lanjut. Pelatihan sebagian besar bersifat manajemen pengelolaan dana PUAP. Diklat yang diberikan bagi pengurus Gapoktan baik diklat di tingkat provinsi maupun kabupaten. Bentuk pelatihan yang diberikan berupa kepemimpinan, manajemen dan usaha pertanian. Pada awal ditetapkannya Desa Bendosewu sebagai desa PUAP, gapoktan melakukan rapat kecil-kecilan dan musyawarah antar pengurus Gapoktan. Pada musyawarah tersebut dibahas mengenai pengelolaan dan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh Gapoktan. Sementara itu untuk sosialisasi kepada anggota Gapoktan merupakan wewenang dari masing-masing ketua kelompok tani untuk mensosialisasikan adanya program PUAP di Desa Bendosewu. Gapoktan Karya Tani dalam melaksanakan kegiatan apapun selalu mengutamakan asas musyawarah. Masyarakat cukup antusias dan puas dengan adanya program PUAP di Desa Bendosewu. Masyarakat mengaku cukup terbantu dengan adanya program PUAP, karena dengan adanya bantuan tersebut dapat meringankan beban dari petani dalam mengelola lahan pertanian. Namun, masyarakat juga menyadari bahwa, ketika jatuh tempo dalam pelunasan pinjaman ke Gapoktan masyarakat masih sering kesulitan dalam melunasi pinjaman dari Gapoktan.

Pengelolaan dana PUAP memang dilimpahkan ke Gapoktan. Walaupun demikian pemerintah tidak lepas tangan begitu saja, pemerintah tetap berperan seperti tetap membina serta mengawasi jalannya pengelolaan dan PUAP tersebut. Untuk pendampingan ke masing-masing Gapoktan pemerintah telah merekrut PMT yang tugasnya memberikan pendampingan, pembinaan serta pengawasan yang wilayah kerjanya ditentukan oleh pihak dinas. Kemudian, PPL mendampingi pada saat awal penyusunan RUB. Pendampingan

PMT telah dihentikan karena kontraknya sudah habis pada tahun 2016. Terdapat surat dari pusat yang menyarankan agar tetap ada pendampingan dari PMT dengan catatan PMT digaji dengan APBD, namun pemerintah menolak. Untuk sementara pendampingan diserahkan ke PPL di masing-masing wilayah. PMT kontraknya sudah habis, masalah pendampingan di alihkan ke PPL. PPL sendiri masih belum jelas tentang pelimpahan wewenang tersebut karena belum ada regulasi yang jelas dari pemerintah daerah.

Kendala lain yang dialami oleh Gapoktan sendiri adalah ketika waktu jatuh tempo pelunasan masyarakat masih terkendala biaya sehingga membutuhkan waktu yang lama, sehingga akan menunda pencairan untuk periode selanjutnya. Namun saat ini kendala seperti hal tersebut sudah jarang dialami oleh Gapoktan Karya Tani. Sedangkan kendala yang dialami oleh pihak pemerintah adalah SDM dari petani yang istilahnya sulit untuk diberi arahan oleh pihak dinas. Kendala lain yaitu ketika Gapoktan memiliki koneksi dengan pihak pemerintah maupun DPR, tetap memaksakan untuk mengelola dana PUAP walaupun dinilai masih belum siap untuk menerima dana hibah tersebut oleh pihak dinas. Dalam hal tersebut pemerintah merasa kalah ketika menangani Gapoktan terkait karena mereka memiliki *backing* yang kuat.

Hasil Program

Untuk perkembangannya di Kabupaten Blitar sendiri menurut pihak dinas yaitu mencapai 50 persen, dalam artian terdapat desa yang memiliki perkembangan pesat maupun lambat. Pemerintah mengajurkan untuk mempermudah pengelolaan dana PUAP di masing-masing Gapoktan agar dibentuk LKM-A yaitu semacam pegawai yang memiliki tugas untuk mengatur keuangan terkait dengan PUAP di masing-masing desa. Desa Bendosewu merupakan salah satu desa PUAP di Kabupaten Blitar yang memiliki perkembangan yang cukup pesat, berdasarkan pendapat dari Ketua Gapoktan pencapaian program PUAP sudah mencapai 90 persen. Hingga saat ini dana PUAP yang dikelola oleh Gapoktan Karya Tani yaitu mencapai Rp 197.392.000. Untuk menunjang usaha pertanian di Desa Bendosewu, Gapoktan Karya Tani memiliki inisiatif menyisihkan sebagian dana PUAP untuk membeli mesin tanam padi manual, harapannya dengan adanya mesin tanam tersebut dapat mempermudah pekerjaan dari petani serta menambah pemasukan kas Gapoktan Karya Tani.

Perkembangan Dana PUAP Gapoktan Karya Tani			
Desember 2013	Desember 2014	Desember 2015	Desember 2016
Rp 133.835.000	Rp 153.149.000	Rp 177.419.000	Rp 197.392.000

Tabel Perkembangan Dana PUAP di Gapoktan Karya Tani 2013-2016

Sumber : Laporan Keuangan Gapoktan Karya Tani 2013-2016 (diolah)

Untuk pelaporan keuangan, pemerintah menganjurkan agar pelaporan tertulis tiap bulan. Selain itu juga memberi gambaran kepada sejumlah Gapoktan agar mampu menyelenggarakan RAT dalam pelaporannya. Untuk mengontrol pelaporan Gapoktan kepada pemerintah merupakan wewenang dari PMT, tidak hanya mendampingi dan membina tetapi PMT juga memiliki tugas untuk mengontrol pelaporan keuangan dari Gapoktan. Untuk sekarang ketika kontrak PMT sudah habis, maka wewenang tersebut diserahkan kepada PPL. Pemerintah juga menyarankan agar setiap pengambilan keputusan terkait dengan keuangan PUAP agar tetap menggunakan asas musyawarah.

Pihak pemerintah dalam melakukan pengawasan yaitu dengan melihat aktivitas pertemuan Gapoktan. Kemudian pihak pemerintah menyarankan agar melakukan pelaporan lisan setiap bulan dan laporan tertulis setiap tahun. Untuk mempermudah pengawasan serta untuk mengurangi timbulnya kecurigaan pihak pengawas yaitu PMT, maka pemerintah memberikan gambaran agar pada saat pelaporan tidak hanya menunjukkan buku kas Gapoktan saja, tetapi juga dilampirkan buku rekening bank sebagai bukti. Sebab buku rekening merupakan bukti agar mempermudah pengawasan serta merupakan bukti yang sulit di elak oleh pihak pengawas.

Sesuai dengan anjuran dari pemerintah bahwa dalam laporan pertanggungjawaban Gapoktan Karya Tani tidak hanya menunjukkan buku kas semata, tetapi juga melampirkan buku rekening dari bank. Alasannya karena memang untuk mempermudah pengawasan serta tidak menimbulkan kecurigaan dari pengawas. Namun sedikit berbeda dengan saran yang diberikan oleh pemerintah bahwa laporan tertulis dilaksanakan setiap tahun, untuk Gapoktan Karya Tani sistem pelaporan dibuat 6 bulan sekali, disesuaikan dengan periode bergulirnya dana PUAP.

Dampak Ekonomi Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Gapoktan Karya Tani

Menurut (Triana,2011:278-279) memberikan pendapatnya mengenai pengertian dari dampak. Menurutnya dampak adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan. Untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi setelah adanya pelaksanaan program PUAP peneliti menggunakan metode penilaian evaluasi dampak *single program before after*.

Adanya program PUAP dapat memberikan banyak manfaat bagi kelompok sasaran yaitu

masyarakat petani. Salah satu manfaat yang diterima oleh petani adalah, dengan memperoleh pinjaman dari Gapoktan secara otomatis masyarakat dapat menggunakan pinjaman tersebut untuk dijadikan modal awal ketika musim tanam tiba. Dalam hal ini masalah yang kerap dialami oleh petani ketika musim tanam tiba adalah modal awal, sebab ketika musim tanam akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain untuk modal awal ketika musim tanam tiba, pinjaman dana PUAP juga dimanfaatkan oleh petani untuk mengembangkan usaha lain yaitu ternak. Dengan adanya pinjaman sebesar 1 juta terdapat masyarakat yang memanfaatkan dana tersebut untuk membeli ternak yang digunakan sebagai tabungan. Pinjaman dari Gapoktan tersebut juga dimanfaatkan petani untuk menambah usaha lain di luar sektor pertanian, dana pinjaman PUAP mereka manfaatkan sebagai modal awal untuk membuka warung kecil-kecilan di depan rumah untuk menambah penghasilan keluarga.

Produksi Komoditas Pertanian

Rata-rata masyarakat berpendapat bahwa sebelum adanya program PUAP mereka merasa kesulitan untuk memperoleh faktor produksi khususnya yaitu modal. Setelah adanya program PUAP yang berupa pinjaman ke masing-masing anggota Gapoktan menurut masyarakat mereka semakin terbantu memperoleh faktor produksi terutama modal. Dengan adanya modal tentunya mereka dapat memenuhi faktor produksi yang lain seperti pupuk, pestisida hingga tenaga kerja. Namun untuk faktor produksi teknologi pertanian masih kurang menguasai. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa terdapat peningkatan produksi setelah adanya program PUAP. Dengan adanya tambahan modal maka petani dapat memenuhi seluruh sarana produksi yang dibutuhkan untuk pertanian. ketika seluruh saran produksi tersebut dapat terpenuhi maka hasil produksi pertanian dapat meningkat.

Sebelum ada program PUAP masyarakat berpendapat bahwa mereka menggarap lahan pertanian disesuaikan dengan modal seadanya. Dalam membeli pupuk, pestisida maupun sarana produksi lainnya mereka tanpa memikirkan kualitas dari produk yang dibeli , disesuaikan dengan modal yang mereka miliki. Hasil yang diperoleh pun juga terkadang kurang maksimal. Hasil pertanian untuk saat ini pun juga tergantung dari cuaca, hama serta penyakit. Untuk saat ini setelah adanya PUAP sebagian besar informan berpendapat bahwa dengan adanya pinjaman dari PUAP mampu meningkatkan kualitas dari hasil produk pertanian mereka. Sebab dengan adanya modal yang memadahi para petani dapat memenuhi saran produksi dengan kualitas yang baik. Sehingga hasil pertanianpun juga akan meningkat kualitasnya.

Permintaan dan Penawaran Komoditas Pertanian

Dilihat dari segi permintaan dan penawaran komoditas pertanian, masyarakat mengaku, mereka tidak pernah kesulitan dalam menjual atau menawarkan hasil produksi mereka, sebab mereka sudah memiliki kenalan tengkulak yang sudah menjadi langganan. Sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa dengan adanya PUAP mereka dapat meningkatkan kualitas hasil pertanian mereka karena adanya tambahan modal. Dengan kualitas yang baik maka para tengkulak yang siap menerima hasil pertanian dari petani akan semakin puas dan tentunya dibeli dengan harga yang relatif lebih mahal.

Pemasaran Komoditas Pertanian

Jika melihat dari segi pemasaran komoditas pertanian milik petani, sebagian besar masyarakat petani mengungkapkan bahwa mereka memanfaatkan hasil pertaniannya untuk konsumsi, selanjutnya mereka menjual hasil pertaniannya tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga lainya seperti untuk kebutuhan sekolah anak-anak mereka dan lain sebagainya.

Sebelum ataupun sesudah adanya program PUAP dalam memasarkan hasil pertanian petani telah memiliki *link* atau langganan tengkulak yang siap menerima hasil pertanian mereka. *Link* tersebut yaitu tengkulak ataupun selipan (penggilingan padi). Sistem jual beli yang diterapkan antara masyarakat petani dengan para tengkulak hanya mengandalkan kepercayaan. Tidak ada teknik pemasaran yang digunakan secara khusus oleh petani. Masyarakat selama ini tidak pernah mengolah hasil produksi, setelah panen padi, gabah hanya dijemur sebelum disimpan ataupun dijual karena gabah kering dan yang masih basah memiliki harga yang berbeda. Kemudian untuk hasil produksi selain padi yaitu jagung, mereka hanya menjual ataupun mengolahnya menjadi nasi jagung.

Usaha Tani serta Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga Petani

Pada aspek ini perubahan yang dialami dilihat dari segi usaha tani, pendapatan dan pengeluaran rumah tangga petani. Pendapat dari berbagai informan menunjukkan bahwa dengan adanya program PUAP mampu menunjang usaha pertanian. Hal tersebut ditunjukkan berdasarkan pengakuan masyarakat dengan adanya PUAP dapat membantu masyarakat dalam memperoleh saprodi sehingga usaha masyarakat juga akan berkembang. Selain itu program PUAP juga dapat mendukung usaha masyarakat di luar pertanian, dengan adanya tambahan modal melalui pinjaman yang diberikan Gapoktan masyarakat juga dapat melakukan usaha di luar sektor pertanian seperti peternakan dan perdagangan. Usaha tani yang dijalankan petani

yaitu dengan menanam lahan pertaniannya dengan berbagai macam tanaman seperti tanaman pangan, tanaman hortikultura, usaha perikanan dan juga peternakan. Selain itu mereka melakukan usaha tani juga tidak hanya mengolah lahan milik sendiri, tetapi mereka juga menggarap lahan milik orang lain dan juga menyewakan lahan milik orang lain.

Dilihat dari peningkatan pendapatan masyarakat petani Adanya modal yang memadai membuat para petani dapat memperoleh sarana produksi yang mereka butuhkan untuk mengelola lahan pertanian. ketika sarana produksi terpenuhi maka dapat mempengaruhi kuantitas maupun kualitas dari hasil pertanian yang dimiliki oleh petani. Dengan adanya hal tersebut maka secara langsung dapat dikatakan bahwa dengan adanya bantuan PUAP yang berupa pinjaman kepada anggota Gapoktan maka secara tidak langsung juga mampu meningkatkan pendapatan dari masyarakat petani sebagai kelompok sasaran dari program PUAP.

Kemudian jika dilihat dari segi pengeluaran masyarakat petani Masyarakat menuturkan bahwa pengeluaran yang mereka selama ini terdiri dari pengeluaran untuk rumah tangga, untuk anak sekolah hingga pengeluaran sebagai modal untuk menggarap sawah. Sebelum adanya program PUAP mereka merasa kesulitan untuk memperoleh modal tambahan untuk pengelolaan lahan pertanian sebab modal mereka sendiri masih belum memadai untuk pengelolaan sawah. Setelah adanya program PUAP masyarakat mengaku bahwa mereka mendapatkan keuntungan salah satunya yaitu dengan mendapatkan pinjaman dari PUAP masyarakat dapat menekan angka pengeluaran khususnya pengeluaran untuk mengelola lahan pertanian.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program PUAP di Gapoktan Karya Tani, Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Kemudian pelaksanaan program PUAP di Gapoktan Karya Tani dinilai telah memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat petani sebagai kelompok sasaran. Namun, jika dilihat dari pemasaran pelaksanaan program PUAP belum memberikan perubahan bagi kelompok sasaran yaitu petani. Ulasan lebih lanjut dari hasil penelitian ini akan dijelaskan sesuai dengan teori yang dipakai untuk menilai pelaksanaan maupun dampak ekonomi dari program PUAP.

A. Pelaksanaan Program PUAP di Gapoktan Karya Tani

a. Berdasarkan data dan hasil wawancara di lapangan bahwa kesimpulan tentang

pelaksanaan program PUAP jika dilihat dari wilayah yang luas terlebih dahulu yaitu di Kabupaten Blitar menunjukkan bahwa pelaksanaan dari program tersebut telah baik. Dari 190 desa yang memperoleh bantuan PUAP semuanya menunjukkan adanya perkembangan dari pengelolaan dana hibah PUAP, dengan catatan bahwa terdapat Gapoktan yang memiliki perkembangan yang pesat dan perkembangan yang kurang pesat. Desa Bendosewu merupakan salah satu desa di Kabupaten Blitar yang memiliki perkembangan cukup pesat dalam pengelolaan program PUAP. Hal tersebut terlihat sejak tahun 2011 desa tersebut telah memperoleh dana hibah PUAP, hingga saat ini perkembangan dananya mencapai Rp 197.392.000, nominal tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 6 tahun pelaksanaan program PUAP di Bendosewu, Gapoktan Karya Tani mampu mengembangkan dana dari 100 juta hingga sekarang menjadi 197 juta. Dalam mengembangkan dana hibah tersebut Gapoktan Karya Tani menggunakannya untuk usaha simpan pinjam untuk anggota Gapoktan Karya Tani. Selain itu, Gapoktan Karya Tani juga membeli alat mesin tanam padi manual dengan harapan dapat memperkenalkan teknologi tepat guna kepada masyarakat serta untuk menambah pendapatan Gapoktan. Namun, alat mesin tanam padi manual tersebut masih belum dioperasikan hingga saat ini karena adanya terkendala.

- b. Cara yang diterapkan oleh Gapoktan Karya Tani dalam memberikan sosialisasi yaitu dengan melakukan musyawarah kepada pengurus maupun seluruh anggota Gapoktan. Awalnya musyawarah dilakukan antara seluruh pengurus Gapoktan untuk membahas tentang pengelolaan dana PUAP di Desa Bendosewu. Kemudian untuk sosialisasi kepada anggota Gapoktan merupakan wewenang dari masing-masing ketua kelompok tani. Menanggapi adanya program PUAP, masyarakat cukup antusias. Namun, yang menjadi kendala Gapoktan yaitu ketika waktu jatuh tempo pelunasan masyarakat masih terkendala biaya sehingga membutuhkan waktu yang lama, sehingga akan menunda pencairan untuk periode selanjutnya. Karena terdapat aturan yang tegas dari pengurus Gapoktan maka kendala tersebut dapat diatasi.
- c. Sebelum mengelola dana hibah PUAP setiap Gapoktan mendapatkan pendidikan dan pelatihan tentang kepemimpinan, manajemen dan usaha pertanian, diklat tersebut diberikan oleh pemerintah baik pemerintah tingkat kabupaten maupun pemerintah tingkat provinsi. Tidak hanya mendapatkan pelatihan tetapi masing-masing Gapoktan juga mendapatkan pendampingan. Terdapat PMT yang tugasnya

mendampingi serta mengawasi dalam pengelolaan dan pelaporan terkait dana PUAP tersebut. Pada temuan data di lapangan menunjukkan bahwa sejak Desember 2016 kontrak PMT telah habis yang artinya pendampingan di masing-masing Gapoktan telah dihentikan serta dana PUAP yang berasal dari pemerintah pusat sudah tidak lagi bergulir. Untuk saat ini di Kabupaten Blitar pelimpahan wewenang pendampingan serta pengawasan terhadap Gapoktan dilimpahkan ke PPL, tetapi yang menjadi kendala saat ini terkait pemerintah daerah Kabupaten Blitar belum memberikan aturan yang jelas terkait dengan pelimpahan wewenang tersebut.

- d. Untuk mengontrol pengelolaan dana PUAP di masing-masing Gapoktan, pemerintah melalui PMT telah melakukan pengawasan yang berbentuk laporan keuangan yang rutin diserahkan pada PMT sesuai dengan periode bergulirnya keuangan masing-masing Gapoktan. Untuk mempermudah serta mengurangi kecurigaan dalam pengawasan dana PUAP maka pemerintah menganjurkan agar laporan keuangan disertai dengan melampirkan buku rekening tabungan. Gapoktan Karya Tani melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan bergulirnya dana simpan pinjam yaitu setiap 6 bulan sekali disesuaikan dengan masa panen dan masa tanam dari masyarakat petani.
- e. Pemerintah daerah telah melakukan banyak upaya terkait dengan pelaksanaan PUAP yaitu tetap menyelamatkan dana tersebut agar setelah ditiadaknya pendampingan dana tersebut tetap berkembang dan lestari. Kemudian pemerintah tetap mengarahkan masyarakat agar tetap menyisihkan dana parkir dan tidak habis untuk simpan pinjam semata, dana parkir tersebut diupayakan dapat dialihkan untuk usaha yang arahnya agribisnis.
- f. Pada pelaksanaan program PUAP pemerintah yaitu pihak Dinas Pertanian dan Pangan mengalami berbagai kendala yaitu rendahnya SDM dari masyarakat petani, hal tersebut terlihat dari sulitnya petani diberi arahan oleh pihak dinas. Kendala selanjutnya yaitu terdapat Gapoktan yang memiliki koneksi dengan pemerintah maupun DPRD, sehingga dengan mudah mereka menjadi desa PUAP tanpa melalui prosedur yang jelas. Adanya *backing* pada Gapoktan tersebut membuat pemerintah merasa kuwalahan menangani masalah tersebut.

B. Dampak Ekonomi Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan di Gapoktan Karya Tani Desa Bendosewu

- a. Produksi Komoditas Pertanian

Terkait dengan kepemilikan faktor produksi, sebagian besar masyarakat mengaku

bahwa setelah adanya PUAP mereka lebih mudah dalam memperoleh faktor produksi terutama modal, ketika modal telah terpenuhi maka secara otomatis mereka dapat memenuhi faktor produksi lain seperti pupuk, pestisida, benih, teknologi dan lain sebagainya.

Untuk peningkatan hasil produksi, sebagian besar informan mengungkapkan bahwa setelah adanya program PUAP hasil produksi pertanian masyarakat petani dapat meningkat. Hal tersebut terjadi karena faktor produksi yang dibutuhkan dalam proses produksi telah terpenuhi maka secara tidak langsung hasil produksi dari petani juga ikut meningkat.

Tentang aspek peningkatan kualitas komoditas pertanian sebagian besar informan menyatakan bahwa setelah adanya program PUAP kualitas hasil pertanian mereka meningkat. Karena dengan adanya PUAP masyarakat petani mendapatkan tambahan biaya untuk modal, sehingga mereka dapat memenuhi faktor produksi yang berkualitas tinggi, sehingga hasil produksi mereka juga meningkat. Namun, peningkatan kualitas hasil produksi pertanian tersebut tidak menentu karena hal tersebut dapat dipengaruhi oleh adanya hama tumbuhan seperti wereng dan penyakit tanaman seperti potong leher.

b. Permintaan dan Penawaran Komoditas Pertanian

Pada aktivitas permintaan dan penawaran hasil pertanian bagi petani dilakukan secara alami. Selama ini masyarakat petani mengaku, mereka tidak pernah merasa kesulitan dalam menawarkan hasil produksi pertaniannya karena telah ada tengkulak yang siap menerima hasil produksi mereka. Setelah adanya PUAP mereka menyatakan bahwa kuantitas maupun kualitas dari hasil produksi mereka meningkat, hal tersebut tentunya membuat pembeli menjadi semakin puas karena komoditas mereka jika dijual kembali oleh para tengkulak akan bernilai jual tinggi.

c. Pemasaran Komoditas Pertanian

Dilihat dari pemanfaatan hasil produksi untuk saat ini masyarakat petani di Desa Bendosewu tidak hanya memanfaatkannya hanya untuk konsumsi keluarga. Melainkan saat ini dengan adanya tuntutan pemenuhan kebutuhan lain masyarakat memanfaatkan hasil produksinya untuk dijual, sehingga dapat diperoleh nilai tambah dari hasil produksi pertanian mereka.

Untuk aspek sistem pemasaran yang dilakukan oleh masyarakat petani, selama ini masyarakat petani tidak menggunakan sistem pemasaran yang spesifik. Untuk pemasaran mereka telah memiliki *link*. Untuk memasarkan produk pertanian, masyarakat petani hanya melalui perantara yaitu tengkulak. Ketika masa panen tiba tengkulak tersebut telah siap menerima hasil produksi petani

sesuai dengan harga yang telah disepakati. Peran dari tengkulak tersebut dinilai sangat membantu petani dalam memasarkan hasil produksi pertaniannya.

Kemudian untuk aspek pengolahan hasil produksi selama ini masyarakat tidak melakukan pengolahan terkait dengan hasil produksinya. Sebagian besar masyarakat menjual hasil produksinya dalam bentuk mentah, karena mereka masih terkendala modal dan belum mengetahui informasi terkait dengan pengolahan hasil pertanian. Untuk padi masyarakat hanya menjual dalam bentuk gabah kering. Kemudian untuk jagung mereka juga menjual dalam bentuk gelondong ataupun pipilan. Hanya dalam jumlah sedikit masyarakat petani yang mengolah hasil produksi pertanian mereka.

Terkait dengan pemasaran komoditas pertanian dengan program PUAP, selama adanya program PUAP pemasaran yang dilakukan petani tidak mengalami perubahan yang berarti. Artinya adanya PUAP tidak berdampak pada pemasaran masyarakat petani.

d. Usaha Tani serta Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga Petani

Jika membicarakan tentang ekonomi tentunya tidak terlepas dari aspek usaha, pendapatan serta pengeluaran. Usaha tani yang dijalankan masyarakat saat ini cukup beragam. Dalam menjalankan usaha taninya tersebut petani tidak hanya melakukan usaha secara perorangan tetapi mereka juga melakukan usaha tani secara kolektif maupun kooperatif. Artinya dalam menjalankan usaha tani mereka tidak hanya menggarap lahan milik pribadi, tetapi mereka juga menggarap lahan pertanian milik orang lain dengan menggunakan sistem bagi hasil. Selain itu mereka juga menyewa lahan milik orang lain. Kemudian untuk menunjang usaha pertanian mereka juga melakukan berbagai jenis usaha tani yaitu usaha tani tanaman pangan, usaha tani tanaman hortikultura, usaha tani perikanan, usaha tani peternakan. Menurut pemaparan dari masyarakat petani setelah adanya PUAP usaha tani yang sedang mereka kembangkan semakin berkembang, karena adanya modal yang memadai mereka juga dapat mengembangkan usaha lain seperti peternakan dan usaha lain diluar sektor pertanian yaitu perdagangan.

Setelah adanya PUAP masyarakat juga mengaku bahwa pendapatan yang mereka terima terkait dengan hasil pertanian juga semakin meningkat karena telah disebutkan sebelumnya bahwa adanya PUAP telah menunjang hasil produksi dari pertanian baik secara kuantitas maupun kualitas. Sehingga secara otomatis pendapatan dari masyarakat petani juga ikut meningkat.

Terkait dengan pengeluaran rumah tangga pertanian, berdasarkan hasil penelitian yang

diperoleh dari lapangan menunjukkan bahwa setelah adanya program PUAP tentunya dengan adanya pinjaman yang berasal dari PUAP masyarakat dapat menekan biaya untuk pengelolaan lahan pertanian. hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya PUAP masyarakat dapat menekan pengeluaran mereka tentunya terkait dengan biaya tidak tetap yaitu mereka dapat menekan biaya untuk sarana produksi komoditas pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustino, Leo. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arifin, Bustanul. (2005). *Pembangunan Pertanian Paradigma Kebijakan dan Strategi Revitalisasi*. Jakarta: PT Grasindo.
- Bungin, Burhan. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Dunn, William N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. (2004). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Faisal, Sanapiah. (1995). *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hanafie, Rita. (2010). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: ANDI.
- Haryanto, Tri, Nur Aini Hidayati dan Wagiono Djoewito. (2009). *Ekonomi Pertanian*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Karnaji. (2011). *Buku Ajar Mataajaran Masalah Kemiskinan dan Kesenjangan*. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Kotler, Philip. (1997). *Manajemen Pemasaran (Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Kontrol)*. Jakarta: Prenhallindo.
- Kunarjo. (2002). *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Parsons, Wayne. (2005). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media.
- Pasolong, Harbani. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rahim, Abdurahman dan Diah Retno Hastuti. (2007). *Pengantar, Teori dan Kasus Ekonomika Pertanian*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Setijanengrum, Erna. (2011). *Buku Ajar Analisis Kebijakan Publik*. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Sinungan, Muchdarsyah. (2000). *Produktivitas Apa dan Bagaimana*. Jakarta: Bumi Aksara
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin. Diterjemahkan oleh Djunaidi Ghony. (1997). *Basics Of Qualitative Research (Grounded theory Procedures and Technique)*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sukirno, Sadono. (1985). *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: FE UI.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (1976). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Todaro, Michael.P. (1985). *Perkembangan Ekonomi di Dunia Ketiga edisi ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michael.P. (2000). *Perkembangan Ekonomi di Dunia Ketiga edisi ketujuh*. Jakarta: Erlangga.

Triana, Rochyati Wahyuni. (2011). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surabaya: Revka Petra Media.

Wahab, Solichin Abdul. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.

Widodo, Joko. (2011). *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Wibawa, Samodra. (1993). *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Yogyakarta: Intermedia.

Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo.

Wirawan. (2011). *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi Dan Profesi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Indro, P.Y. Nur. *Kemiskinan Global dalam Perspektif "Development as Freedom" Amartya Sen Kasus : Indonesia*. Jurnal Hubungan Internasional. Universitas Katolik Parahyangan.

Pattinama, Marcus. J. (2009). *Pengentasan Kemiskinan dengan Kearifan Lokal (Studi Kasus di Pulau Buru, Maluku dan Surade, Jawa Barat*. Jurnal Sosial Ekonomi. Fakultas Pertanian. Universitas Pattimura. Volume. 13, No. 1, Juli 2009: 1-12.

Reti, Nyeyu Arianti dan Indra Siregar. *Faktor Rendahnya Kesejahteraan Petani Kecil dan Upaya Mengatasinya*. e-journal Fakultas Pertanian Unib.

Siregar, Hermanto dan Dwi Wahyuniarti. *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*. Institut Pertanian Bogor.

Suryawati, Chriswardani. (2005). *Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. JMPK Vol. 08/No.03/September/2005.

Skripsi

Hiasa, Wicha Azisty Monna. (2012). *Dampak Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Kelompok Sasaran*

(Debitur KUR Mikro) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kertajaya Kota Surabaya. Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya.

Sagala, Zagarudin. (2010). *Dampak Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Terhadap Pendapatan Petani (Studi Kasus di Desa Hasang, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara*. Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor

Suangana, Angga. (2011). *Pengaruh Program Pengembangan Agribisnis Perdesaan (PUAP) Terhadap Pendapatan Usaha Tani Padi (Studi Pada Gapoktan Rukun Makmur Desa Cibitung Kulon, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor)*. Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor

Dokumen

ADART Gapoktan "Karya Tani"

Berita Acara Reorganisasi Pengurus Gabungan Kelompok Tani

Daftar Perkembangan Pelaksanaan PUAP di Kabupaten Blitar

Laporan Keuangan Gapoktan Karya Tani

Laporan Kinerja BP4K Kabupaten Blitar 2015

Laporan Kinerja Direktorat Pembiayaan Pertanian 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 16/Permentan/Ot.140/2/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUAP Renstra Kementerian Pertanian 2014-2019

RPJMDesa Bendosewu 2015-2020

RPJMN tahap ke-3 (2015-2019)

Seksus Pertanian Badan Pusat Statistik Tahun 2013

Website

Badan Pusat Statistik. (2016) <https://www.bps.go.id/> (diakses pada tanggal 3 Oktober 2016)

<http://bisnis.liputan6.com/read/2527391/keinpertanian-jadi-solusi-jitu-kurangi-pengangguran> (diakses pada tanggal 24 Oktober 2016).

Volume 5, Nomor 3, September – Desember 2017

<http://cybex.pertanian.go.id/gerbangdaerah/detail/9038> (diakses pada tanggal 27 Oktober 2016).

<http://www.cnnindonesia.com/> (diakses pada tanggal 27 Oktober 2016).

<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/--ro-bangkok/---ilo->

jakarta/documents/publication/wcms_451921.pdf, (diakses pada tanggal 21 Oktober 2016)

<http://www.medanbisnisdaily.com/news/arsip/read/2011/08/11/47786/mentan-pemerintah-tetap-lanjutkan-program-puap/#.WBD2CLn7DMw> (diakses pada tanggal 27 Oktober 2016)



